PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI KAITAN REGISTRASI ULANG NOMOR HANDPHONE

****

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat**

**Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

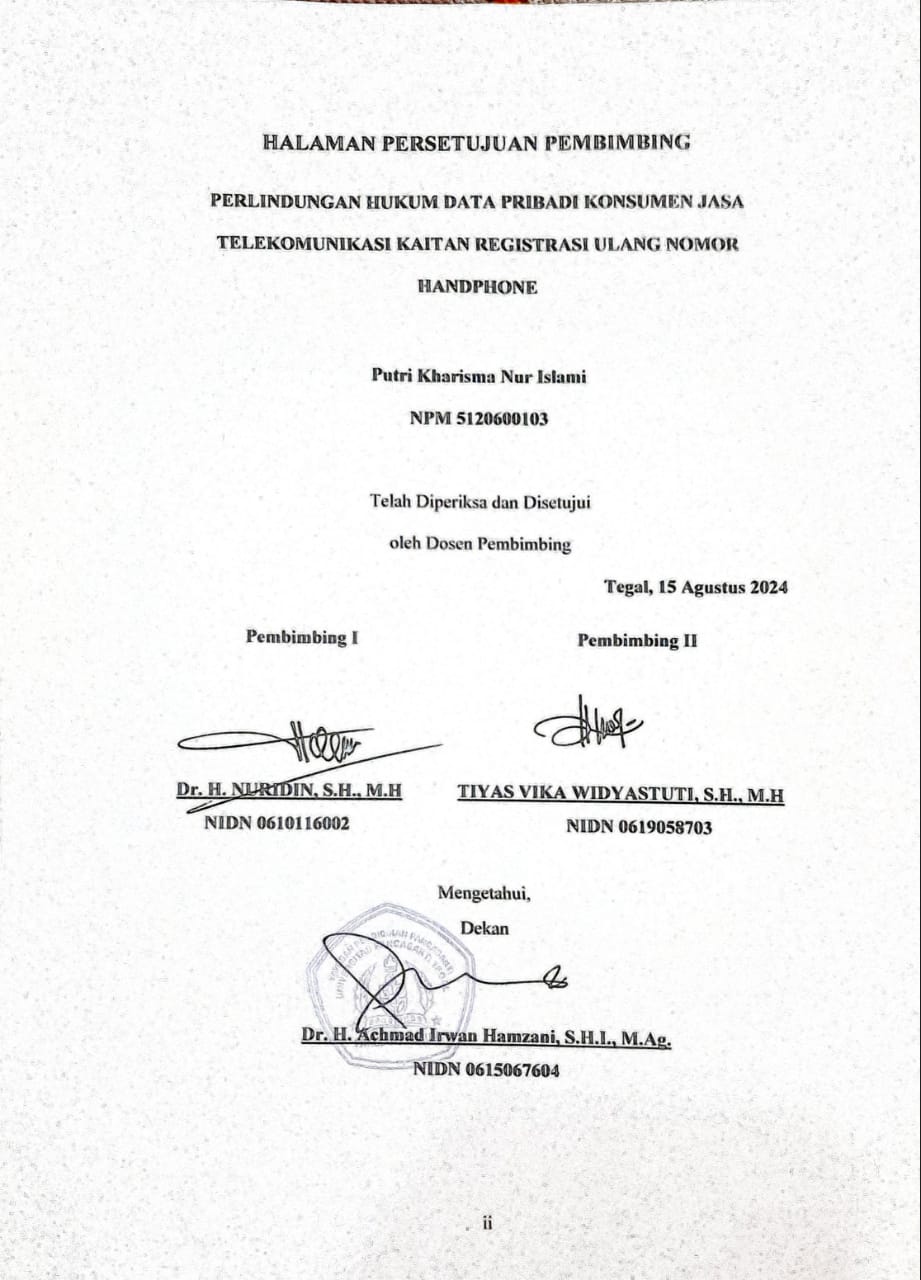
**Oleh :**

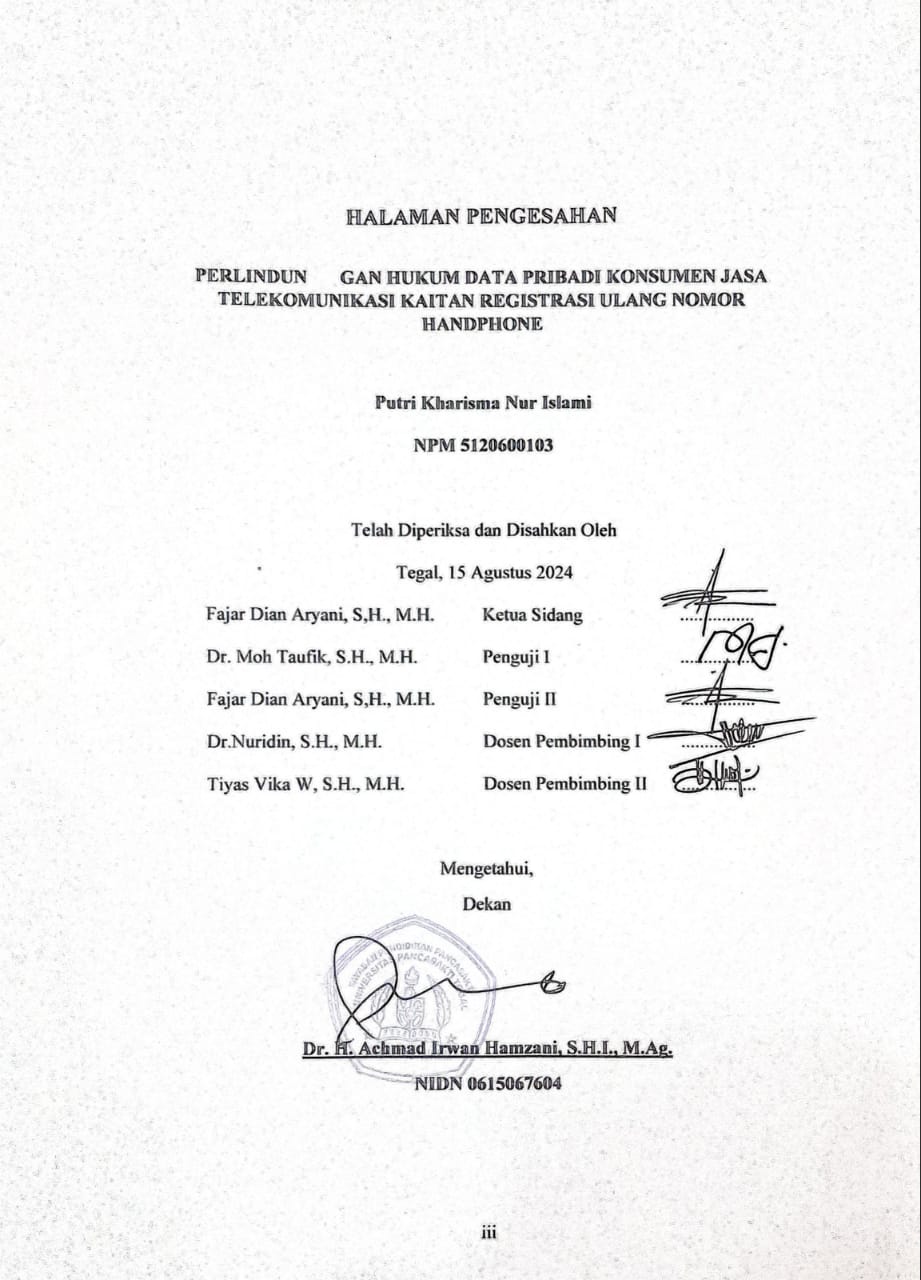
**PUTRI KHARISMA NUR ISLAMI 5120600103**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

## ABSTRAK

## Putri Kharisma Nur Islami, 5120600103, Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Jasa Telekomunikasi Kaitan Registrasi Ulang Nomor Handphone

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016. mewajibkan bagi setiap Warga Negara untuk melakukan regitrasi ulang nomor handphone dengan menggunakan nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan. Sampai diberlakukannya peraturan ini, belum ada kebijkan atau peraturan lain yang secara komprehensif membahas perihal perlindungan data pribadi. Sehingga dengan adanya fenomena ini penulis akan mengkaji bagaimanakah perlindungan hukum data pribadi konsumen jasa telekomunikasi kaitan registrasi ulang nomor handphone serta bagaimana tanggung jawab hukum dari operator telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen.

Jenis penelitian ini menggunakan hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang ada di perpustakaan atau biasa dikenal dengan penelitian dokumen. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan perUndang-undangan. Data yang peroleh dari data sekunder yang terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (pelengkap).

Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum dalam kasus yang diangkat penulis dapat dilihat dari peraturan-peraturan terkait yang telah di buat pemerintah, mana ada yang bersifat preventif dan represif. Sedangkan perihal tanggung jawab terkait kelalaian dari penyelenggara jasa telekomunikasi dapat disesuaikan dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu sebagai acuan, wawasan dan menambahkan informasi bagi pemerintah, penyelenggara jasa telekomunikasi dan konsumen jasa telekomunikasi dalam mengantisipasi kebocoran data pribadi.

**Kata Kunci:** Telekomunikasi, Registrasi, Data Pribadi

***Putri Kharisma Nur Islami, 5120600103, Legal Protection of Personal Data of Telecommunication Service Consumers in Relation to Mobile Number Re- Registration***

*The government, through Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 14 of 2017, Amendment to Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 12 of 2016, requires every citizen to re-register their cellphone number using their Family Card number and Population Identification Number. Until the enactment of this regulation, there were no other policies or regulations that comprehensively discussed the protection of personal data. So, with this phenomenon, the author will examine how the legal protection of personal data of consumers of telecommunications services is related to re-registration of mobile phone numbers and what the legal responsibilities of telecommunications operators are regarding leaks of consumers' personal data.*

*This type of research uses normative law which uses secondary data in libraries or commonly known as document research. And this research uses a statutory approach. Data obtained from secondary data consisting of primary law, secondary legal materials and tertiary (complementary) legal materials.*

*The research results show that legal protection in the case raised by the author can be seen from the relevant regulations that have been made by the government, some of which are preventive and repressive. Meanwhile, regarding responsibility related to negligence on the part of telecommunications service providers, it can be adjusted to Article 19 of the Consumer Protection Law. It is hoped that the results of this research will serve as a reference, insight and additional information for the government, telecommunications service providers and consumers of telecommunications services in anticipating personal data leaks.*

***Keywords:*** *Telecommunications, Registration, Personal Data*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirMu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir,berilmu, beriman dan bersabar.semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dalam meraih cita-cita.

Dengan ini saya persembahkan karya kecil ini untuk :

* Terimakasih untuk kedua orang tuaku atas doanya yang tak henti dan telah mengurangi tugas negara sehingga bisa mengerjakan karya kecil ini.
* Terimakasih kepad Keluarga Besar, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
* Terimakasih untuk teman-teman tercinta, yang telah memberikan bantuan, dukungan moral, dan kebersamaan selama masa studi dan penyusunan skripsi ini.

## MOTTO

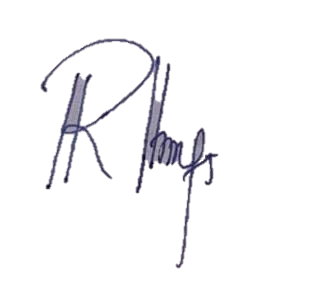
* Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. ( H.R. At-Tabrani).
* Hendaklah kalian berdagang karena berdagang merupakan sempilan dari sepuluh pintu rizki.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur khadirat Allah SWT Alhamdulillah skrispi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Stui Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW yang membawa rahmat untuk kita semua.Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan da dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut di ucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal Dr. Taufiqulloh, M.Hum.
2. Dekan Fakultas Hukum Dr. H. Achmad Irwan Hamzani,S.H.I.,M.Ag beserta jajarannya.
3. Dosen Pembimbing I Dr. H. Nuridin, S.H., M.H dan Dosen Pembimbing II Tiyas Vika Widyastuti,S.H.,M.H.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal Shalih.
5. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
6. Orangtua,serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi.
7. Kawan-kawan penulis dan semua pihak yang memberikan motivasi dan menempuh studi maupun dalam penyusunan skkripsi ini yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membakas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 06 Agustus 2022

Putri Kharisma Nur Islami

# DAFTAR ISI

[LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_TOC_250024)

PENGESAHAN iii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

[HALAMAN PERSEMBAHAN vi](#_TOC_250023)

[MOTTO vii](#_TOC_250022)

[KATA PENGANTAR viii](#_TOC_250021)

[DAFTAR ISI x](#_TOC_250020)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP xii](#_TOC_250019)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_TOC_250018)

* 1. [Latar Belakang 1](#_TOC_250017)
  2. [Rumusan Masalah 6](#_TOC_250016)
  3. [Tujuan Penelitian 7](#_TOC_250015)
  4. [Manfaat Penelitian 7](#_TOC_250014)
  5. [Urgensi Penelitian 7](#_TOC_250013)
  6. [Tinjauan Pustaka 8](#_TOC_250012)
  7. [Metode Penelitian 10](#_TOC_250011)
  8. [Sistematika Penulisan 13](#_TOC_250010)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 15](#_TOC_250009)

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum 15
2. [Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Perdata 19](#_TOC_250008)
3. [Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi 26](#_TOC_250007)
4. [Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi 34](#_TOC_250006)
5. [Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar 42](#_TOC_250005)
6. Tentang Perusahaan Telekomunikasi/Provider 46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51

* 1. [Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Jasa Telekomunikasi Kaitan Registrasi Ulang Nomor Handphone 51](#_TOC_250004)
  2. [Tanggung Jawab Perusahaan Provider dalam Menanggulangi Resiko Kebocoran Data Pelanggan 68](#_TOC_250003)

[BAB IV PENUTUP 77](#_TOC_250002)

1. [Kesimpulan 77](#_TOC_250001)
2. Saran 78

[Daftar Pustaka 80](#_TOC_250000)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP 90](#_TOC_250019)

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Perkembangan zaman menuntut berbagai lini kehidupan untuk ikut berkembang, tidak terkecuali perkembangan teknologi informasi di dunia1. Bidang komunikasi dan informasi sendiri adalah salah satu bidang teknologi informasi yang memberikan dampak yang signifikan dikehidupan masyarakat. Maka dengan adanya dampak yang signifikan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum seperti yang dipertegas dalam “Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (selanjutnya disebut “UUD NRI 1945”) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, “dituntut untuk siap membentuk dan membuat regulasi-regulasi yang sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi dan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku” 2.

Telekomunikasi merupakan salah satu bidang yang paling nampak jelas dengan perkembangan teknologi. Dalam bidang telekomunikasi hadirnya telepon seluler atau telepon genggam ataupun yang sering disebut dengan *smartphone* adalah bukti paling konkrit akan pesatnya perkembangan teknologi.3 Telepon genggam atau *smartphone* saat ini sudah

1 Sanusi, S., La Dee, M., Widyastuti, T. V., & Lubis, A. F. (2023). “*Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum”*. PTT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

2 Widyastuti, T. V. (2023). “*Perbandingan Hukum Perdata: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Internasional”.* PTT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

3 Syah, M. I., & Widyastuti, T. V. (2024). “Tinjauan Hukum Hak Keperdataan Dalam Aplikasi Satu Sehat Guna Perlindungan Data Pribadi”. *Pancasakti Law Journal* (PLJ), 2(1), 13-24.

1

merambah ke berbagai kalangan dan berbagai latar belakang ekonomi, dimana mereka menggunakannya dengan berbagai keperluan yang beragam.4

Provider atau operator telekomunikasi merupakan salah satu faktor pendukung dalam menunjang efektivitas pengunaan telepon seluler atau *smartphone*.5 Semakin banyaknya nilai-nilai keuntungan yang ditawarkan oleh pihak provider atau operator guna menarik konsumen, membuat peningkatan signifikan penggunaan provider. Hal ini juga terbukti makin banyaknya konsumen yang mengonta-ganti nomor telponnya guna mencari dan memanfaatkan segala bentuk promosi atau nilai-nilai yang ditawarkan oleh pihak provider.6

Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi” telah “mengatur kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh penyelenggara jasa telekomunikasi atau dalam hal ini disebut sebagai operator telekomunikasi”. Salah satu kewajiban yang harus ditaati oleh operator telekomunikasi ialah “merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pengguna atau pelanggan jasa”. Yang dimana hal ini tertuang dalam “Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi”.

4 Mayangsari, A. C., Hartati, S., & Widyastuti, T. V. (2024). “*Tanggung Jawab Hukum dalam Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Online Sistem Revolving”*. Penerbit NEM.

5 Shinta Rajni. (2020). “*Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar”*. **Skripsi**. UIN Syarif Hidayatullah. hlm.1

6 *Ibid,* hlm.2

Kelemahan pada penggunaan media telekomunikasi dan informasi pada provider yaitu memberikan peluang pada pelaku kejahatan *cyber* untuk mencari keuntungan dengan mudah, hal tersebut disebabkan karena adanya tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dari oknum-oknum yang berada di luar wadah penyelenggara jasa telekomunikasi maupun oknum- oknum sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi7. Kejahatan yang paling umum terjadi disini ialah “*spamming”* dan “*phising”*. “*Spamming* sendiri adalah penipuan promosi baik melalui *short mesaage service* (SMS) ataupun melalui telpon”. Sedangkan “*phising* adalah pencurian data pribadi”.8

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah mengeluarkan regulasi diatur dalam “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 12 tahun 2016” yang kemudian diubah menjadi “Permenkominfo Nomor 14 tahun 2017”, dan diubah kembali dengan “Permenkominfo Nomor 21 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi”, dimana “pengguna telepon seluler diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang Kartu SIM, dengan mengirim Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) melalui pesan pendek (SMS)”, sebagaimana dalam “Pasal 6 huruf

* 1. Permenkominfo Nomor 21 tahun 2017”.

7 Agnes Putri Arzita. (2019). “*Penegakan Hukum Terhadap Pencurian Data Pribadi Pengguna Provider”*, **Skripsi** .Universitas Lampung, hlm. 2-3

8 Romadhiyah, F. T., Hartati, S., & Widyastuti, T. V. (2024). “*Perlindungan Hukum bagi Konsumen Penyalahgunaan Shopee Paylater oleh Pihak Ketiga”*. Penerbit NEM.

*“Calon pelanggan prabayar mengirimkan layanan pesan singkat atau menghubungi pusat kontak layanan yang diakses melalui nomor MSISDN yang akan didaftarkan dengan mengirimkan/menyampaikan data berupa NIK dan Nomor kartu keluarga.”*

Data yang telah diinput oleh pihak pelanggan jasa telekomunikasi nantinya akan disinkronikasikan dengan “data pribadi pengguna oleh pihak Direkotorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, yang didalam data pribadi tersebut memuat nama, alamat, keluarga serta umur” 9. Jika data yang input telah sesuai maka, pelanggan jasa telekomunikasi tersebut dapat menggunakan kartu SIM tersebut.

Peraturan yang dikeluarkan oleh Kominfo tersebut, telah membuat kewajiban pihak operator telekomunikasi dari menjaga data pribadi dari pihak pelanggan jasa telekomunikasi semakin berat. Karena apabila data pribadi tersebut disalah gunakan akan menimbulkan kerugian terhadap pihak pengguna jasa telekomunikasi. Hal ini dapat mempertegas bahwasanya “pihak penyelenggara jasa telekomunikasi telah melanggar hak asasi pengguna jasa”. Seperti yang sudah dijelaskan dalam “Pasal 28G ayat

(1) UUD 1945” yaitu “setiap warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.

9Nurhana, A., & Indawati, P.. (2023). “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler”. *Amnesti: Jurnal Hukum.* hlm. 67

*“Southeast Asia Freedom of Expression Network”* (SAFENET) menjelaskan bahwa, “kasus kebocoran 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi SIM card handphone (HP) di Indonesia menjadi kasus kebocoran data terbesar di Asia”. Direktur Eksekutif SAFENET Damar Juniarto mengatakan, “angka 1,3 miliar data tersebut merupakan angka yang luar biasa besar dan yang terbesar hingga 9 September 2022”. Indonesia menjadi “korban dengan angka yang luar biasa spektakuler dengan angka 1,3 miliar data pengguna jasa telekomunikasi, dan menjadikan Indonesia sebagai Negara kebocoran data terbesar di Asia sampai sekarang”. Ada tiga pihak yang harus “bertanggung jawab perihal registrasi Nomor Handphone, pertama adalah Kominfo itu sendiri sebagai pihak yang mewajibkan, kedua adalah operator dalam hal ini penyelenggara jasa telekomunikasi, lalu yang ketiga adalah Dukcapil”. Data tersebut diunggah oleh sebuah akun bernama “Bjorka di situs *Breached.to* yang sebelumnya juga merupakan pembocor data pengguna Indihome”. Menanggapi kebocoran tersebut, “Menkominfo meminta agar masyarakat menjaga data pribadi masing-masing dan mengganti password-nya secara berkala”.10

Pemerintah sebagai pemilik kewenangan dalam pembuatan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, kadang kali dalam membuat kebijakan atau aturan memiliki dampak negatif. Dalam hal ini data pribadi yang wajib diserahkan pada saat proses registrasi ulang nomor handphone adalah salah

10 Wiryono, S., & Santosa, B. (2022), *SAFENet: 1,3 Miliar Data Pengguna SIM Card Diduga Bocor Jadi. Kasus Terbesar di Asis,* [*https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16180311/safenet-13-miliar-data-pengguna-sim-*](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16180311/safenet-13-miliar-data-pengguna-sim-card-diduga-bocor-jadi-kasus-terbesar-di)[*card-diduga-bocor-jadi-kasus-terbesar-di.*](https://nasional.kompas.com/read/2022/09/09/16180311/safenet-13-miliar-data-pengguna-sim-card-diduga-bocor-jadi-kasus-terbesar-di) Diakses pada tanggal 25 Juni 2024.

satu hak yang dijamin oleh Negara. Akan tetapi, pada penerapannya untuk saat ini belum ada pengaturan atau regulasi yang jelas terhadap perlindungan data pribadi. Maka dikhawatirkan, kebijakan pemerintah tanpa dasar yang kuat dan komprehensif dapat mencederai hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat.11 Meskipun saat ini telah dikeluarkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi akan tetapi implementasi di lapangan masih belum terwujud terutama jika dikaitkan dengan regulasi nomor handphone.

Pemaparan yang ada di atas dapat diperoleh beberapa permasalahan hukum yaitu apakah perlindungan data pribadi masyarakat telah terjamin jika dikaitkan dengan regulasi yang mengharuskan masyarakat melakukan registrasi ulang Nomor menggunakan NIK dan KK . Untuk itu disini penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Jasa Telekomunikasi Kaitan Registrasi Ulang Nomor Handphone”**

## Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum data pribadi konsumen jasa telekomunikasi kaitan registrasi ulang nomor handphone ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum dari operator telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen ?

11 Putri, M. S., “Perlindungan Hukum Data Pribadi Bagi Pelanggan Jasa Telekomunikasi Terkait Kewajiban Registrasi Kartu SIM”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 2, Desember 2018, hlm. 197-198

## Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi konsumen jasa telekomunikasi terkait registrasi ulang nomor handphone .
2. Untuk mengkaji tanggung jawab dari operator telekomunikasi terhadap kebocoran data pribadi konsumen .

## Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam hal memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perlindungan Data Pribadi;
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi konsumen jasa telekomunikasi terhadap diberlakukannya regulasi terkait registrasi ulang nomor handphone.

## Urgensi Penelitian

Penelitian terkait registrasi nomor handphone cukup menyita perhatian belakangan ini, dikarenakan banyaknya kebocoran data pribadi akibat adanya peraturan terkait aktivasi Nomor Handphone. Data Pribadi yang tadi digunakan untuk melakukan aktivasi selanjutnya akan diproses oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tepat setelah pengguna Nomor

Handphone menyetujui *privacy policy* dengan cara melakukan proses Registrasi via SMS. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut membuat urgensi perlindungan hukum atas data pribadi pengguna nomor handphone semakin tinggi.

## Tinjauan Pustaka

Penulis dalam meneliti serta mengkaji penelitiannya, mendapatkan beberapa masukan dari penelitian dan skripsi-skripsi terdahulu yang mana memiliki karakteristik yang sama dalam hal topik penelitiannya. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terdahulu :

Penelitian yang dilakukan “Atika Suzanna mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh” (2023) dalam skripsinya yang berjudul “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi *Sim Card* Ditinjau dari *Fiqh Dusturiyah”*.12 Penelitian tersebut dengan penelitian penulis memiliki perbedaan yaitu dalam segi permasalahan yang diangkat, dimana penelitian tersebut mengangkat permasalahan perihal perlindungan hukum data pribadi dari sudut pandang *fiqh dusturiyah*. Sedangkan penelitian penulis mengangkat permasalahan terkait tanggung jawab dari operator telekomunikasi akibat kebocoran data pribadi konsumennya ditinjau dari hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian skripsi dari “Shinta Rajni, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta” (2020) dalam skripsinya yang berjudul

12 Suzanna, A. (2023). “Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Registrasi Sim Card Ditinjau dari Fiqh Dusturiyah”, **Skripsi**, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi kartu Prabayar”13. Di dalam skripsi tersebut mengambil permasalahan terkait implikasi hukum dari keberadaan kebijakan atau regulasi yang mengharuskan pengguna jasa telekomunikasi untuk melakukan proses registrasi ulang nomor handphone*.*

Penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nurdinisari mahasiswa Universitas Indonesia (2013) dalam skripsinya yang berjudul ”Perlindungan Hukm Terhadap Pivasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunkasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (*Spamming*)”14. Skripsi tersebut meneliti tentang perlindungan hukum terhadap perlindungan pengguna telekomunikasi dalam menerima promosi yang merugikan, sedangkan penulis meneliti perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa telekomunikasi dengan adanya peraturan registrasi nomor handphone.

Dari ketiga penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, penulis sendiri lebih menekankan perihal permasalahan terkait pertanggungjawaban dari pihak operator telekomunikasi ataupun penyedia jasa layanan telekomunikasi dalam menjaga data pribadi konsumen mereka, terhadap kebijakan registrasi ulang nomor handphone*.* Sehingga hal tersebutlah yang menjadi pembeda dan pembaharuan dari skripsi-skripsi terdahulu.

13 Rajni, S. (2020). “*Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi kartu Prabayar”,* **Skripsi**. Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

14 Nurdinisari, R. (2013). “Perlindungan Hukm Terhadap Pivasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi Dalam Penyelenggaraan Telekomunkasi Khususnya Dalam Menerima Informasi Promosi Yang Merugikan (*Spamming*)”, **Skripsi**. Universitas Indonesia.

## Metode Penelitian

Guna mendapatkan kebenaran yang bisa dipercaya keabsahannya dalam suatu penelitian harus menggunakan suatu metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Pengertian metode penelitian suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, dan cara untuk melakukan suatu prosedur. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara- cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan- lingkungan yang dihadapinya15. Berikut ini beberapa metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif16, yang dimana adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data desktriptif analistis, yaitu hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.17

15 Hamzani, A. I., Widyastuti. T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M. (2023). “Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review”. *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191

16 Hamzani, A. I., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2020). “*Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal”,* Yogyakarta; Tanah Air Beta

17 Hamzani, A. I., Widyastuti. T. V., Khasanah, N., & Rusli, M. H. M., (2024*). “Implementation Approach In Legal Research”*, IJAAS, Vol. 13 No. 2

## Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode normatif yuridis. pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis.18 Jelas dalam hal ini memberitahu kepada penulis guna melakukan penelitian terhadap hukum positif dan norma tertulis yang berlaku.19

## Sumber Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu normatif, maka data- data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier20.

* 1. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui proses kepustakaan atau kajian pustaka yang dimana hanya berupa teori-teori dari berbagai literatur.21 Data ini sendiri terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

18 Muhammad, A. (2015), “*Hukum dan Penelitian Hukum”*. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet.4. hlm. 53

19 Mamudji, S., *et. al.,* (2015) “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”,* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,Cet.17. 2015 hlm. 10

20 Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Kristanto, K. (2024). Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals). *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2173-e2173. https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173

21 Widyastuti, T.U., Marsino, W., Udin, A.F, & Sutaguna. I.N.T (2024), *Penelitian Tranformatif: Mengatasi Isu-Isu Kontemporer Dengan Kombinasi Metode Kuantitatif dan*

* + 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,22 terdiri dari beberapa aturan diantaranya, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang- undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 .

* + 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, berupa buku-buku, jurnal, artikel, internet, dan

22 Soekanto, S., (2014). “*Pengantar Penelitian Hukum”,* Jakarta: Universitas Indonesia (UI-

sumber lainnya yang memiliki kolerasi dengan penulisan penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen yang berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti.

## Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.23 Dalam penulisan ini penulis menguraikan mengenai peraturan perUndang-undangan nasional yang terkait dengan perlindungan data pribadi.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat bab dan tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN. Pendahuluan yang mana berisikan suatu gambaran secara singkat kesuluran isi penulisan karya ilmiah yang terdiri dari: Latar Belakang, Pembatasan dan Rumusan Masalah,

23 Sugiyono, (2016), “*Memahami Penelitian Kualitatif”,* Bandung: Alfabeta, hlm. 145

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II. TINJAUAN KONSEPTUAL, Dalam bab ini berisikan antara lain mengenai Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Hukum, Regulasi Registrasi Nomor Handpone, Pengertian Hak Privasi, Data Pribadi, Registrasi Kartu Prabayar, Perusahaan Telekomunikasi/Provider, Tanggung Jawab dalam Hukum Perdata.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab ini berisikan

tentang pembahasan data yang telah diperoleh dari penilitian dan telah di periksa kembali secara teliti selanjutnya di bahas dengan secara runtun dan sistematis.

BAB IV. PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis akan menyajikan suatu kesimpulan dan saran dari segala penguraian dan pembahasan dari seluruh isi judul skripsi ini.

**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum dari Perlindungan Hukum**

Kemukakan oleh Aritoteles, Manusia adalah “*zoon politicon”* atau “makhluk sosial”, oleh karenanya “setiap anggota masyarakat mempunyai hubungan satu sama lain”24. Manusia sebagai “makhluk sosial”, baik disadari ataupun tidak, “selalu akan melakukan perbuatan hukum” *(“rechtshandeling”)* serta “hubungan hukum” *(“rechtsbetrekkingen”)*.*25* Soeroso mengemukakan pendapat bahwa “perbuatan hukum” (“*rechtshandeling”*) ialah “segala perbuatan subjek hukum, baik orang atau badan hukum, akibat-akibatnya dikuasai oleh hukum dan karena akibat- akibat itu dapat dianggap sebagai kemauan orang tersebut dalam pemeliharaan hukum”.26 Perbuatan hukum meliputi beberapa perbuatan hukum, mulai dari perbuatan hukum biasa seperti membuat wasiat atau hadiah, dan perbuatan hukum penjaminan seperti jual beli, kontrak kerja dan lain-lain.27

Hubungan hukum *(rechtsbetrekkingen)* sendiri merupakan hubungan antara dua subjek hukum atau lebih. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak

24 Ulvianti, R. (2023). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan Di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 183-194.

25 Soeroso, “*Perbuatan Melawan Hukum”*, Bandung: Alumni, 2016. Cet-Ke.3, hlm.32

26 Soeroso, “*Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Cet-Ke.14, hlm.59

27 Widyastuti, T. V. (2023). “*Perbandingan Hukum Perdata: Teori dan Praktek dalam Masyarakat Internasional”.* PTT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

15

lainnya.28 Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. Hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum, menurut van Apeldorn29 “peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak”. Perihal hubungan hukum Logemann sebagaimana dikutip oleh Soeroso berpendapat, bahwa dalam tiap hubungan hukum terdapa pihak yang berwenang/berhak meminta prestasi yang diebut dengan *“prestatie subject”* dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut *“plicht-subject”*.30

Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang akan ada dalam suatu hubungan hukum, selain itu tiap-tiap anggota masyarakat memiliki hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari

28 *Ibid.,*

29 *Ibid.* Hlm.251

30 Widjaja, G., & Budiman, E. (2024). “Konsekuensi Hukum Atas Kehilangan Aset Perusahaan Berfasilitas Pembebasan Bea Masuk”. *Netizen: Journal Of Society And Bussiness*, 1(3), 156-170.

perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.31 Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat32.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada “subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis” 33. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa “perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian”34.

Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat represfi dan preventif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap

hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan

31 Soekanto, S., *Op.cit,* hlm 133.

32 Moertiono, R. J. (2021). “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum”. *All Fields of Science Journal Liaison Academia and Sosiety*, *1*(3), 252- 262.

33 Nurmala, L. D. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Pendidik”. *Gorontalo Law Review*, *1*(1), 67-76.

34 Azis, A., Handriani, A., & Basri, H. (2019). “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan”. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, *10*(1), 59-74.

perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan. 35

Philipus M. Hadjon menuturkan bahwa berkaitan dengan konsumen, berarti “hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut”. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” adalah “salah satu produk hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak konsumen”. Dengan berlakunya UU Perlindungan Konsumen, “setiap pelaku usaha (termasuk prinsipal) yang menjual barang dan jasa kepada konsumen baik langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kualitas barang dan jasa serta kerugian yang diderita konsumen” 36.

Menurut Setiono, “perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memun gkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia”.37 Menurut Muchsin, “perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

35 Asri Wijayanti, “*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi”,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. Ke-7, hlm. 10.

36 Suharnoko, “*Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)”,* Jakarta: Kencana, 2014, Cet. Ke-8, hlm. 61.

37 Setiono*, “Rule of Law(Supremasi Hukum”),* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia”.38

Dari uraikan pengertian-pengertian menurut para ahli yang ada di atas dapat dinyatakan bahwa “fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa” 39. Di lain hal hukum juga berfungsi memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

## Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Perdata

* 1. **Pengertian Tanggung Jawab dan Tanggung Jawab Hukum**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)40 memberikan pengertian tentang “tanggung jawab adalah tanggung jawab atas segala sesuatu apabila ada sesuatu yang dituduhkan, dituntut dan dituntut”. Dalam kamus hukum, “tanggung jawab adalah syarat seseorang melakukan apa yang diminta kepadanya atau diwajibkan

38 Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

39 Sutrisno, A. R., & Hakim, L. (2023). “Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisinya (Studi Putusan Nomor: 102/Pid. Sus/2022/PN. Met)”. *YUSTISI*, *10*(1), 143-153.

40 Moeljadi, D., Sugianto, R., Hendrick, J. S., & Hartono, K. (2016). “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”.

kepadanya”.41 Dalam hukum, “tanggung jawab merupakan akibat dari kebebasan seseorang dalam kaitannya dengan perbuatannya yang berkaitan dengan prinsip moral atau perilaku dalam melakukan suatu perbuatan”.42 Menurut hukum perdata, “tanggung jawab dasar terbagi menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan resiko”. Sehingga dikenal dengan istilah “tanggung jawab berdasarkan kesalahan *(lilability without based on fault* dan tanggung jawab tanpa kesalahan yang diketahui *(lilability without fault)* yang dikenal dengan tanggung jawab aksidental atau tanggung jawab absolut *(strick liabiliy)”*.43

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa seseorang mempunyai hak hukum atas perbuatan tertentu ataupun mempunyai tanggung jawab hukum yang berarti seseorang bertanggung jawab atas hukuman apabila perbuatannya melawan hukum.44 Pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban kolektif adalah “salah satu pembeda dalam tanggung jawab hukum”. Pertanggungjawaban individu atau tanggung jawab perseorangan adalah “tanggung jawab seseorang atas tindak pidana maupun perdata yang dilakukannya”,45 sedangkan tanggung

hlm.35

41 Hamzah, A., (2015), “*Kamus Hukum”,* Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. Ke.4, hlm. 26.

42 Notoatmojo, S., (2018), “*Etika dan Hukum Kesehatan”*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.3,

43 Triwulan, T., & Febrian, S., (2010), “*Perlindungan Hukum bagi Pasien”*, Jakarta:

Prestasi Pustaka, hlm 49

44 *Ibid.,* hlm.48

45 Mentari, N. (2020). “Pertanggungjawaban Individu atas Ganti Rugi Disgorgement yang Melibatkan Emiten”. *Arena Hukum*, *13*(3), 501-527.

jawab bersama adalah “tanggung jawab perseorangan atas tindak pidana maupun perdata yang dilakukan oleh orang lain”.

Konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait, akan tetapi tidaklah identik dengan konsep kewajiban hukum. Seorang individu secara hukum diharuskan untuk berperilaku dengan cara tertentu, jika perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa. Namun, tindakan paksa ini tidak mesti dituukan teradap individu yang diwajibkan “pelaku pelanggaran” namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan46.

## Prinsip Tanggung Jawab Hukum Perdata

Konsep hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup “perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis” 47. Ketentuan perundang-undangan dari

46 Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi”. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(1), 83-93. <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.85>

47 Ardiansyah, R., Asmarudin, I., & Widyastuti,T. V. (2023). “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Peralihan Hak Atas Tanah dengan Sertipikat Hak Milik”. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, *1*(2), 267–278. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.31>

perbuatan melawan hukum “bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan”.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya “bertentangan dengan undang-undang”, tetapi “berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati- hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat” .48 Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai “suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur prilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat”.49 Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

* + 1. Prinsip “bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan” (“*liability based on fault”*) 50

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah “prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana

48 Zahro, A. L., Fauzi, M. Y., & Pratiwi, N. (2024). “Analisa Putusan Nomor 46 PK/Ag/2020 juncto Putusan Nomor 847/Pdt. G/2019/PA. Tng) Terhadap Sengketa Hybrid Contract”. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *16*(1), 60-73.

49 Anjani, A. S. (2024). “Analisis Yuridis Ingkar Janji Untuk Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. *LEX PRIVATUM*, *13*(1).

50 Shidarta, (2015), “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia”,* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet.7 hlm. 65.

dan perdata”. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, “seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya”. Dalam “pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum”, mengharuskan terpenuhnya empat unsur pokok, yaitu: “adanya perbuatan”; “adanya unsur kesalahan”; “adanya kerugian yang diterima”; “adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian”.

* + 1. Prinsip “Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab” (“*presumption of liability”*)51

Prinsip ini menyatakan, “tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai ia membutikan ia tidak berselah”. Jadi beban pembuktian ada si tergugat. Dalam prinsip ini “tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah”. Berdasarkan asas ini, “beban pembuktian ada pada tergugat”. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa: “kerugian

ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya”; “pelaku usaha

51 Anshori, A.G., (2010), “*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia”,* Yogyakarta: Gajahmada University Press, hlm. 48.

sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian”; “kerugian yang timbul bukan karena alasannya”; dan “kesalahannya atau kelalain yang dilakukan oleh pelaku usaha”.

* + 1. Prinsip “Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab” (“*presumption of nonliability”*) 52

Prinsip ini untuk “tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan”. Contoh dalam penerapan prinsip ini adalah “hukum pengangkutan, kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan yang biasanya dibawa dan diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang”. Dalam hal ini, “pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintai pertanggungjawaban”.

* + 1. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (“*strict liability”*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut *(“absolute liability”)*. Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. “*Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang

52 Suherman, *“Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)”,* Bandung: Alumni Cet. V, 2015, hlm. 21

menentukan”. Namun, ada beberapa pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeur*. Sebaliknya, “*absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian”. 53

* + 1. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (“*limitation of liability principle”*).54

Prinsip tanggung jawab dengan “pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai *klasula eksonerasi* dalam perjanjian standar yang dibuatnya”. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru. Dalam hukum perdata, jenis dasar sanksi hukum adalah “tanggung jawab atas kinerja”. Hukum perdata adalah “suatu kewajiban hukum yang didasarkan pada hubungan perdata antar pihak”.

53 *Ibid.,*hlm.23

54 Labatjo, R. (2019). “Analisis Yuridis Tentang Prinsip Tanggung Jawab Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas Dan Angkutan Jalan*”*. *Jurnal Yustisiabel*, *3*(2), 118-134.

## Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi

Privasi seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaanya. Ketika tidak ada privasi, maka hidup seseorang akan terasa seperti neraka dunia, karena rentan terhadap kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi serta rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain.55 Kekhawatiran lainnya yaitu terhadap informasi terkait hal-hal pribadi akan diketahui secara luas, khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan diketahui dan diawasi pihak tertentu.

Dalam sejarahnya konsep privasi bukanlah berasal dari Indonesia. Konsep privasi sendiri berasal dari “masyarakat barat yang pada umumnya bersifat individualistis, lain halnya dengan masyarakat kita yang cenderung komunal” 56. Yang pada dasarnya, sudah menjadi hal yang lumrah apabila urusan pribadi seseorang diketahui oleh orang atau pihak lain. Oleh sebab itu, akan terasa sulit untuk menerjemahkan penjelasan konsep privasi yang ada di Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “privasi berarti sebagai kebebasan; keleluasaan pribadi”. “privasi” yang diungkapkan dalam KBBI sendiri memiliki berasal dari kata “privat yang artinya pribadi”.57 Hak privasi adalah “salah satu hak-hak dasar manusia atau yang biasa dikenal dengan hak asasi manusia”. Hak asasi manusia pada kodratinya melekat pada manusia sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. “Secara implisit hak

55 Nurjannah, I. (2023). “*Perlindungan hukum terhadap data pribadi pada administrasi kependudukan oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor*

*23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*”. (Doctoral dissertation, Universitas Merdeka Pasuruan).

56 Noer, K. U. (2021). *Pengantar Sosiologi Untuk Mahasiswa Tingkat Dasar*. Perwatt.

57 Moeljadi, D., *Loc.cit*. hlm 701

atas privasi diatur dan dilindungi oleh UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1)”.

“*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.*

Kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Hal ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Negara, pemerintah dan bagi setiap organisasi pada tataran manapun berkewajiban untuk hal tersebut58. Pemahaman dan penjelasan terkait apa itu hak privasi atau hak pribadi dan sejauh mana batasan-batasan hak privasi seseorang hingga saat ini belum ada penjelasannya. Pentingnya perlindungan pada hak atas privasi seseorang sangatlah berpengaruh dalam menjamin terlindunginya hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang59.

Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia, perlindungan hak atas privasi diatur dalam “Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia”, yang menegaskan: “Tidak seorang pun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap

58 Ibrahim, R. S. (2018). “Hak-Hak Keperdataan Anak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. *Lex Privatum*, *6*(2).

59 Salfutra, R. D. (2018). “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektiffilsafat Hukum”.

*PROGRESIF: Jurnal Hukum*, *12*(2), 2146-2158.

kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu”.

Dalam perumusan yang lebih singkat dan lugas, “perlindungan hak atas privasi ditegaskan melalui pengaturan dalam Kovenan Internasional Hak- hak Sipil dan Politik, khususnya dalam Pasal 17” , yang menyebutkan :

1. “Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya”.
2. “Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas”.

Banyak peraturan di Indonesia yang mengatur perihal hak privasi, akan tetapi belum ada satu pun dari peraturan tersebut yang menjelaskan secara rinci tentang hak privasi. Berikut ini beberapa undang-undang yang membahas perihal hak privasi atau hak pribadi:

## Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang ini, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang melindungi hak pribadi (“ *privacy right”*) 60 diantarnya:

* 1. Prinsip bahwa “informasi tentang data pribadi seseorang dapat diakses dan disebarkan hanya dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum *(lawful means)* dan dengan izin orang/pihak yang bersangkutan” ;

60 Departemen Perhubungan, *“Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Teknologi Informasi”,* (Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan RI), 2000, hlm.19

* 1. Prinsip bahwa “hanya informasi yang relevan yang dapat diakses dalam arti seseorang tidak dapat mengakses data yang tidak ada hubungan dengan tujuan semula” ;
  2. Prinsip bahwa “informasi data pribadi seseorang tidak boleh disebarkan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan *(prior consent)* dari orang yang bersangkutan, kecuali hak tersebut dibenarkan oleh hukum” ;
  3. Prinsip bahwa “penyebaran informasi data seseorang melalui *automatic processing data* harus sesuai dengan ketentuan nasional tentang hak asasi manusia yang melindungi hak pribadi seseorang” .

“Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” menjelaskan bahwa: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hakpribadi (*privacy rights*)”. Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: (a) “Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan”. (b) “Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata- matai”; (c) “Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang” .

## Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-undang ini memang tidak menggunakan terminologi hak privasi melainkan “hak pribadi”. Dalam penjelasan “Pasal 40 UU 36/1999” ketentuannya berbunyi sebagai berikut *“...pada dasarnya informasi yang dimiliki seseorang adalah* ***hak pribadi yang harus dilindungi*** *sehingga penyadapan harus dilarang” 61*. Namun, dalam beberapa keadaan, ketentuan tersebut dapat disimpangi sehingga tindakan penyadapan diperbolehkan sebagaimana diatur dalam “Pasal 42 ayat (2) huruf b UU 36/1999” yang menyatakan, *“untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi serta dapat memberikan informasi yang diperlukan atas permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan Undang-undang yang berlaku”.*

## Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Badan publik “berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 6 ayat (1)” . Sedangkan pada “ayat (3) huruf c dengan pasal yang sama menjelaskan bahwa informasi publik yang

61 Permatasari, E., (2024), “arti privasi, Derogable Rights, dan Non- Derogable Rights”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi,](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d5605606b42e/hak-privasi) diakses tanggal 27 Juni 2024 Jam 20.53 WIB.

tidak dapat diberikan oleh badan publik salah satunya adalah informasi yang berhubungan dengan hak-hak pribadi”.

## Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

* 1. “Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh ada objek penelitian tanpa persetujuan darinya”. (“Pasal 21”)
  2. “Setiap orang beerhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”. (“Pasal 29 ayat (1)”)

## Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

* 1. “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan”. (“Pasal 57 ayat (1)”).
  2. “Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku” dalam hal: “perintah undang-undang”; “perintah pengadilan”; “izin yang bersangkutan”; “kepentingan masyarakat”; atau “kepentingan orang tersebut”. (“Pasal 57 ayat (2)”).

## Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

“Setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan privasi dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya”. (“Pasal 32 huruf (i)”).

## Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

“Data Pribadi adalah tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.”

Perlu dipahami penjelasan perihal hak privasi di atas terkandung unsur-unsur gangguan atas privasi yang hanya dapat dilakukan dalam kasus- kasus yang ditetapkan oleh undang-undang,serta gangguan yang diterapkan atas dasar undang-undang harus memenuhi beberapa prasyaratan berikut:

1. “sesuai/tidak bertentangan dengan ketentuan dan tujuan dari Konvenan” ;
2. “logis dalam konteks tertentu”;
3. “menguraikan secara detail kondisi kondisi khusus yang membenarkan adanya gangguan atas privasi”;
4. “hanya dapat dilakukan oleh otoritas yang ditunjuk dalam undang undang tersebut” ;
5. “hanya dilakukan atas dasar kasus per kasus”.

Panduan tersebut juga menegaskan “adanya larangan praktik pengambilan dan penguasaan data pribadi tanpa didasarkan pada undang-

undang oleh pihak lain, baik otoritas publik, maupun badan-badan privat” 62. Data pribadi ini mencakup data yang terdapat dalam komputer, data bank maupun data-data yang terdapat dalam perangkat lain. Dalam konteks ini, “setiap individu memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh kepastian mengenai data pribadi yang tersimpan secara otomatis dalam file data, untuk kepentingan apa data tersebut dikumpulkan dan badan/institusi yang memegang kendali atas data-data pribadi mereka”.63 Dengan demikian setiap individu memiliki hak untuk meminta perbaikan atau penghapusan data pribadi apabila data yang dikumpulkan keliru atau proses pengumpulannya bertentangan dengan undang-undang.64 Berdasarkan penjelasan-penjelasan terkait hak privasi yang ada di atas, dapat disimpulkan bahwa “tidak disebutkan secara tegas mengenai konsep hak privasi, akan tetapi konsep ini telah diakui dan diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada”. Namun, masalah penyebutan dan pengertian “hak privasi sendiri hanya dapat kita temui dalam UU ITE”. Perihal pengertian dalam UU ITE tersebut pun tak cukup untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai hak privasi 65.

62 Pettarani, A., Wijaya, M., Widyastuti, T. V., & Said, A. L. (2024). “*Pengantar Kebijakan Publik : Teori dan Praktek”.* Media Penerbit Indonesia

63 Priliasari, E. (2023). “Perlindungan Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *12*(2).

64 Philipus. M. H., (2022). “*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet.14, hlm. 160

65 Suari, K. R. A., & Sarjana, I. M. (2023). “Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia”. *Jurnal Analisis Hukum*, *6*(1), 132-142.

## Tinjauan Umum tentang Data Pribadi

Di era globalisasi ini, dalam menentukan perkembangan ekonomi suatu negara baik negara maju maupun berkembang dapat ditentukan melalui suatu media pemberi informasi.66 Perihal informasi individu dalam pengelolaannya ditangani oleh pemerintah dan swasta, akan tetapi kemunculan era komputer saat ini menciptakan ancaman yang lebih besar bagi privasi individu tersebut, serta kemungkinan individu menderita kerugian sebagai akibat dari ketidaktelitian atau pembocoran informasi akan jauh merugikan individu tersebut. Era digital telah memicu ledakan pertumbuhan data pribadi yang dibuat, disimpan dan ditransmisikan pada komputer dan perangkat *mobile, broadband* dan situs internet dan media67. Semakin pesatnya kemajuan teknologi dapat menimbulkan ancaman serius bagi privasi pribadi dan keamanan informasi .

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian terkait “data”, data adalah “keterangan yang benar dan nyata, serta keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan)”. Dalam kehidupan sehari-hari “data memiki arti yaitu suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya”. Data adalah “bentuk jamak dari dantum”, berasal dari bahasa Latin yang berarti “sesuatu yang diberikan”.68

66 Dewi, S. (2016). “*Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia”*, Bandung : Yustisia, hlm 53

67 Pelealu, A. G. (2018). “*Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*”, (Doctoral dissertation, UAJY).

68 Purwanto, (2007). “*Jurnal: Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*”.

Data bisa juga didefinisikan sebagai “sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek”. dan “dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan”. Data yang baik adalah “data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable),* tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan69.”

Berikut ini adalah definisi maupun pengertian data menurut pendapat para ahli:

* 1. Menurut Nuzulla Agustina70, “data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi”.
  2. Menurut Arikunto71, “data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan”.
  3. Menurut Slamet Riyadi72, “data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari hasil suatu pengamatan di mana data dapat berupa angka atau lambang”.

69 Wisnu, D. P. (2019). “Pengamatan Data Meteorologi Untuk Keselamatan Navigasi Di Pelayaran Saat Kondisi Cuaca Buruk”. *KARYA TULIS*.

70 Agustina, N. “*Sukses UN SMA Jurusan IPS 2009”*. Niaga Swadaya.

71 Arikunto, S. (1998). “*Pendekatan Penelitian*”. *Jakarta: Rineka Cipta*.

72 Wati, F. “Bab 5 Pengumpulan Data”. “*Menulis Karya Ilmiah dengan Cerdas: Panduan*

* 1. Menurut Anhar73, “data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi”.
  2. Menurut Haer Talib74, “data adalah sekumpulan fakta dan sebuah fakta tak lain adalah sebuah kenyataan atau kejadian”.
  3. Menurut Lia Kuswayatno75, “data adalah kumpulan kejadian atau peristiwa yang terjadi di dunia nyata yang berupa angka-angka, huruf- huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari semuanya”.
  4. Menurut H. J. Sriyanto76, “data adalah suatu keterangan atau informasi tentang objek penelitian”.
  5. Menurut Wahyu Supriyanto dan Ahmad Muhsin77, “data adalah bahan baku dalam sebuah informasi, atau kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, fakta, tindakan, benda, dan sebagainya”.

Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa data adalah merupakan “sejumlah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan, atau masalah baik yang berbentuk angka-angka maupun yang berbentuk kategori atau keterangan” 78. Suatu data dapat

disebut sebagai data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan

73 Santi, I. H., & Karina, P. M. D. (2022). “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Data Transaksi Jual Beli Di Toko Andis’s Collection”. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, *1*(2), 193-214.

74 Talib, H. (2014). “*Panduan Lengkap Ms Access 2013”*. Elex Media Komputindo

75 Kuswayatno, L. (2006). “*Mahir berkomputer”*. PT Grafindo Media Pratama.

76 Sriyanto, H. J. (2017). “*Mengobarkan api matematika”*. CV Jejak (Jejak Publisher).

77 Supriyanto, W., & Muhsin, A. (2008). *“Strategi perancangan perpustakaan digital”.*

Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.

78 Syahri, A. A. (2014). “Statistika Pendidikan”. *SIGMA (Suara Intelektual Gaya Matematika)”*, *6*(2), 127.

seseorang, oleh karenanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh, alamat rumah di dalam secarik kertas kosong adalah data. Berbeda halnya apabila di dalam secarik kertas tersebut tertulis sebuah alamat rumah dan nama pemilik rumah tersebut, data tersebut adalah data pribadi. Alamat rumah di dalam secarik kertas kosong bukan data pribadi karena data tersebut tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemiliknya, sedangkan data alamat rumah dan nama pemiliknya dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemilik data tersebut, oleh karena itu dapat disebut sebagai data pribadi.79

Yang dimaksud disini yang dapat diidentifikasi adalah “seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial” 80. Entitas yang dilindungi dalam mekanisme perlindungan data pribadi adalah “orang perorangan” (*natural person*) bukan “badan hukum” (*legal person*).81 Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut “*the right to private life” 82*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk

79 Dewi, S., *loc.cit,* hlm. 115

80 *Ibid.* hlm.115

81 Draft RUU Perlindugan Data Pribadi, hlm.20

82 Dewi, S., *loc.cit,* hlm. 115

hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi 83.

Jika disimpulkan secara umum, maka yang dimaksud dengan “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi. Pembahasan dalam tulisa ini dibatasi pada data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. Ketentuan mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah “Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya”. Perlindungan privasi berhubungan erat dengan pemenuhan hak data pribadi, perlindungan data pribadi di Indonesia tersebar di berbagai undang-undang.

Perlindungan data pribadi sendiri merupakan salah satu bentuk dari perlindungan privasi yang diamanatkan langsung oleh “Konstitusi Negara Republik Indonesia yang mengandung penghormatan atas nilai-nilai HAM dan nilai-nilai persamaan serta penghargaan atas hak perseorangan sehingga perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memberikan keamanan privasi dan data pribadi dan menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif”.84

83 Mutiara, U., & Maulana, R. (2020). “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi”. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, *1*(1), 42-54.

84 Purwanto, *Jurnal: Penelitian Tentang Perlindungan Hukum Data Digital*, Jakarta:

Indonesia saat ini, sendiri belum memiliki peraturan maupun kebijakan yang pasti terkait perlindungan data pribadi dalam satu aturan khusus. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum85. Adapun peraturan perundangan tersebut antara lain; “[Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/36/node/122/uu-no-7-tahun-1971-ketentuan-pokok-kearsipan) [Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/36/node/122/uu-no-7-tahun-1971-ketentuan-pokok-kearsipan)”, “[Undang-Undang Nomor 8 Tahun](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/37/node/25/uu-no-8-tahun-1997-dokumen-perusahaan) [1997 tentang Dokumen Perusahaan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/37/node/25/uu-no-8-tahun-1997-dokumen-perusahaan)”, “[Undang-Undang Nomor 10 Tahun](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/node/30/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan) [1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/node/30/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan) [Perbankan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/334/node/30/uu-no-10-tahun-1998-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan)”, “[Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4af3c27570c04/nprt/1060/uu-no-36-tahun-2009-kesehatan), [Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/349/node/269/uu-no-36-tahun-1999-telekomunikasi)”, dan “[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan) [Kependudukan](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26195/node/758/uu-no-23-tahun-2006-administrasi-kependudukan)” (“UU Adminduk”).86

Data pribadi yang berkaitan langsung dengan data elektronik. “Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas [Undang-](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik) [Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/27912/nprt/1011/uu-no-11-tahun-2008-informasi-dan-transaksi-elektronik)” (“UU ITE”) merupakan “referensi utama untuk menjawab masalah perlindungan informasi/data pribadi di internet”. UU ini memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Meskipun demikian, secara “implisit UU ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi

85 *Ibid.,* hlm. 266

86 MJP Sagala, *Semua Peraturan yang Mengatur dalam Masyarakat untuk Kedamaian yang Berkeadilan* (*Perlindungan Data Pribadi),* [*http://mjpsagalahukum.blogspot.com/2015/01/perlindungan-data-pribadi.html,*](http://mjpsagalahukum.blogspot.com/2015/01/perlindungan-data-pribadi.html) diakses tanggal 27

elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Penjabaran tentang data elektronik pribadi diamanatkan lebih lanjut oleh UU ITE dalam PP PSTE” (“Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik”).

UU ITE menjabarkan dengan jelas perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, diantaranya; “perlindungan dari penggunaan tanpa izin”, “perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik”, dan “perlindungan dari akses dan interferensi illegal”. Perihal dengan “perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin Pasal 26 UU ITE” menjelaskan bahwa “penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan”. Setiap orang maupun pihak yang melanggar ketentuan tersebut dapat digugat atas kerugian yang telah ditimbulkan.

“Bunyi Pasal 26 UU ITE adalah sebagai berikut”:

1. “Penggunaan setiap informasi, melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan”.
2. “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.

Pasal 26 memberikan penjelasan “data pribadi” merupakan “salah satu bagian dari hak pribadi seseorang”. Sedangkan definisi “data pribadi tidak dijelaskan dalam UU ITE akan tetapi dalam Pasal 1 PP PTSE dijelaskan

lebih lanjut perihal definisi data pribadi yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat,dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaan”.

Penjelasan “pasal 26 ayat (1) UU ITE juga menerangkan lebih jauh tentang pengertian hak pribadi”. Isi penjelasan itu adalah sebagai berikut: “Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*)”. Dalam penjelasan pasal tersebut Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: (a) “Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan”; (b) “Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai”; (c) “Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang”.

Jika ditarik penafsiran secara umum, maka perlindungan data sebenarnya telah diatur ke dalam pasal-pasal selanjutnya dalam “UU ITE”, yaitu pada “pasal 30 sampai pasal 33 serata pasal 35 yang masuk ke dalam Bab VI I mengenai Perbuatan yang Dilarang”. Secara tegas “UU ITE melarang akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan”. Akan tetapi selain itu, “UU ITE juga menegaskan bahwa tindakan penyadapan dilarang, akan tetapi dalam rangka upaya hukum maka penyadapan dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang”. Setiap pihak atau orang yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan yang

dilarang tersebut dapat mengajukan gugatan dan pelaku pun memiliki tanggung gugat atas apa yang telah diperbuat.87

## Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar

Mulai 31 Oktober 2017 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memberlakukan registrasi nomor pelanggan kartu prabayar yang harus divalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) No. 14 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi”, kebijakan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan harus ditaati. Registrasi ini, sebagaimana termuat dalam “Siaran Pers No. 187/HM/ KOMINFO/10/2017”, merupakan “upaya Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan nomor pelanggan terutama pelanggan prabayar sebagai komitmen Pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan kepada konsumen serta untuk kepentingan *national single identity”*.88

Validasi data calon pelanggan dan pelanggan lama adalah hal terpenting dalam melakukan proses registrasi kartu prabayar. Validasi tersebut harus berdasarkan “NIK dan no Kartu Keluarga (KK) yang terekam di database Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen

87 Utomo, R. P., Idayanti, S., & Widyastuti, T. V. (2023). *Upaya Perbankan dalam Penyelesaian Card Skimming*. Penerbit NEM.

88 Biro Humas Kominfo, *Pemerintah akan Berlakukan Peraturan Registrasi Kartu Prabayar dengan Validasi Data Dukcapil,* [*https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-*](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers)[*pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-*](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers)[*prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran\_pers,*](https://www.kominfo.go.id/content/detail/10874/siaran-pers-no-187hmkominfo102017-tentang-pemerintah-akan-berlakukan-peraturan-registrasi-kartu-prabayar-dengan-validasi-data-dukcapil/0/siaran_pers) diakses tanggal 27 Juni 2024 Jam 11.23 WIB

Dukcapil)” 89. Registrasi kartu prabyar sendiri dapat dilakukan sendiri oleh pelanggan baru dan bagi pelanggan lama dapat melakukan registrasi ulang. Jika registrasi tidak dilakukan, dampaknya calon pelanggan tidak akan bisa mengaktifkan kartu perdana dan pelanggan lama akan mengalami pemblokiran nomor. Validasi sendiri dilakukan karena beberapa alasan diantaranya: “untuk mencegah terorsime”; “mencegah kejahatan”; “menanggulangi HOAX”; “menumbuhkan perekonomian”; dan “amankan transaksi non tunai”.

Menurut Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad M Ramli menjelaskan bahwa “pelanggan hanya diwajibkan menyampaikan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK)”. “Tidak perlu menyampaikan data nama ibu kandung,” Pernyataan tersebut berkaitan erat dengan kerisauan sejumlah kalangan bahwa registrasi ulang kartu prabayar berpotensi disalahgunakan. Menyampaikan nama ibu kandung lazimnya dilakukan pada kartu kredit. Jika nama ibu kandung bocor, potensi penyalahgunaan data pribadi pelanggan makin besar.90

Registrasi kartu prabayar dapat dilakukan secara online melalui situs web resmi operator dengan mengklik beberapa tautan berikut ini :

1. Telkomsel (Telkomsel dan AS)

89 Librianty, A., *Untung Rugi Registrasi Kartu SIM Prabayar*, [https://www.liputan6.com/tekno/read/3329144/untung-rugi-registrasi-kartu-sim-prabayar,](https://www.liputan6.com/tekno/read/3329144/untung-rugi-registrasi-kartu-sim-prabayar) diakses tanggal 27 Juni 2024 Jam 13.43 WIB

90 *Perlindungan Data Pribadi, Masalah dalam Registrasi Kartu Prabayar,* [https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e872f3c0639/perlindungan-data-pribadi--masalah-](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e872f3c0639/perlindungan-data-pribadi--masalah-dalam-registrasi-kartu-prabayar) [dalam-registrasi-kartu-prabayar,](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e872f3c0639/perlindungan-data-pribadi--masalah-dalam-registrasi-kartu-prabayar) diakses tanggal 27 Juni 2024 Jam 14.01 WIB

Konsumen atau pengguna nomor telkomsel, dapat mengakses <https://mobi.telkomsel.com/ulang?ch=WEB>, kemudian dengan cara :

“isikan No handphone, NIK KTP, No Kartu Keluarga dan Password yang akan dikirimkan oleh operator melalui SMS”. Lalu klik "kirim"

1. XL atau Axis

Konsumen atau pengguna nomor XL atau Axis, dapat mengakses <https://registrasi.xl.co.id/ulang>, kemudian dengan cara :

* 1. “Memasukkan nomor HP”;
  2. “Pelanggan akan menerima kode verifikasi yang dikirim operator XL melalui SMS”;
  3. “Memasukkan kode verifikasi” ;
  4. “Mengisi data Nomor KTP dan Nomor Kartu Keluarga”.

1. Indosat Ooredoo

Konsumen atau pengguna nomor Indosat Ooredoo, dapat mengakses <https://mycare.indosatooredoo.com/registration>, kemudian

dengan menggunakan cara:

* 1. “Masukkan NIK atau Nomor e-KTP”;
  2. “Masukkan nomor Kartu Keluarga”;
  3. “Klik tanda kotak I'am not a robot”;
  4. “Klik "periksa" jika data yang dimasukkan sudah benar”.

1. Kartu Tri

Konsumen atau pengguna nomor kartu Tri , dapat mengakses <https://registrasi.tri.co.id/>, kemudian dengan menggunakan cara: “Pilih

opsi sesuai kartu yang dimiliki pengguna”. “Registrasi Calon Pelanggan” untuk kartu baru dan “Registrasi Ulang” untuk kartu lama.

* 1. **Registrasi untuk kartu Tri Baru**, kemudian “masukan nomor Tri yang akan diregristrasikan”, lalu “memasukkan Nomor Induk Kependudukan sesuai e-KTP”, “masukan Nomor Kartu Keluarga”, “masukkan angka terakhir nomor seri (ICCID) yang tertera di belakang kartu SIM/USIM yang akan diregistrasikan”, “Klik kotak "Iam not a robot”; “Klik "kirim" jika data yang dimasukkan sudah benar”.
  2. **Registrasi Ulang Kartu Tri Lama, “m**asukan nomor Tri yang akan diregristrasikan”; “masukkan Nomor Induk Kependudukan sesuai e-KTP”; “masukan Nomor Kartu Keluarga”; “masukkan kode rahasia yang dikirimkan operator XL ke Handphone pengguna”; “masukkan 4 angka terakhir nomor seri seri (ICCID) yang tertera di belakang kartu SIM/USIM yang akan diregistrasikan”; “Klik "kirim" jika data yang dimasukkan sudah benar”.

Registrasi kartu prabayar melalui juga dapat melalui SMS ke 4444. Bagi pengguna kartu lama, format sms untuk semua operator ketik:

ULANG#NIK#Nomor KK# kirim ke 4444. Sementara untuk pengguna kartu baru: Indosat, Smartfren, dan Tri ketik NIK#Nomor KK kirim ke 4444; XL Axiata (XL dan Axis) ketik DAFTAR#NIK#Nomor KK dan kirim ke 4444; Telkomsel dengan mengetik REG#NIK#Nomor KK lalu kirim ke 4444.91

## Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Telekomunikasi/Provider

Kata perusahaan sudah sering kita dengar dan diucapkan dala kehidupan sehari-hari. Mungkin tanpa kita sadari pun sesungguhnya kita sering berhubungan perusahaan baik itu perusahaan kecil, perusahan menengah maupun perusahaan besar. Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia menyatakan: “bahwa berdasarkan tinjauan hukum, istilah perusahaan mengacu pada badan hukum dan perbuatan badan usaha dalam menjalankan usahanya. Lebih lanjut, perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi dengan acuan laba”. 92

Dalam “Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan” menjelaskan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara republik Indonesia yang bertujuan memperoleh keuntungan (laba)” . Merupakan salah satu dari produk hukum

91 Dina, S., *Cara Registrasi Kartu Prabayar Melalui Online & SMS Ke 4444,* [https://kominfo.go.id/content/detail/12272/cara-registrasi-kartu-prabayar-melalui-online-sms-ke-](https://kominfo.go.id/content/detail/12272/cara-registrasi-kartu-prabayar-melalui-online-sms-ke-4444/0/sorotan_media) [4444/0/sorotan\_media,](https://kominfo.go.id/content/detail/12272/cara-registrasi-kartu-prabayar-melalui-online-sms-ke-4444/0/sorotan_media) diakses tanggal 27 Juni 2024 Jam 14.43 WIB

92 Muhammad, A. K. (2010). “*Hukum Perusahaan Indonesia”,* Bandung: Citra Aditya Bakti, Cet.5, hlm. 56

Indonesia terkait hukum perusahaan. Di dalam hukum perusahaan ruang lingkupnya ada pada lapangan Hukum Perdata (khususnya Hukum Dagang) dan sebagian ada pada Hukum administrasi Negara93 yang tercermin pada peraturan perundang-undangan di luar KUHPerdata dan KUHDagang. Namun, “apabila dilihat dari obyek usaha dan tata perniagaannya, termasuk di dalam lapangan Hukum Perdata khususnya di bidang hukum harta kekayaan yang mana di dalamnya terletak hukum dagang”. Sedangkan, apabila dilihat dari kegiatan usahanya yang bergerak dalam kegiatan ekonomi pada umumnya, maka hukum perusahaan ini termasuk pula dalam cakupan hukum ekonomi.94

Dalam penelitian ini perusahaan yang akan dibahas adalah Perusahaan telekomunikasi, yang merupakan perusahaan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Perusahaan telekomunikasi merupakan salah satu perusahaan yang paling dinamis dibanding perusahaan dibidang lain. Perusahaan telekomunikasi mengelola input produksi menjadi output yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Di Indonesia sendiri perusahaan telekomunikasi ialah perusahaan yang sering disebut dengan perusahaan penyedia jasa telekomunikasi95.

Jasa telekomunikasi sendiri pengertiannya telah tertera jelas dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pasal 1

93 Damanik, P., Nugraha, S., Widyastuti, T. V., & Nur, F. (2024). “*Hukum Administrasi Negara : Teori, Prinsip dan Praktik Tata Kelola Pemerintahan”.* Media Penerbit Indonesia

94 Pangestu, M. T., & Aulia, N. (2017). “*Hukum Perseroan Terbatas dan Perkembangannya di Indonesia*”. *Business Law Review*, 1(03).Hal.8

95 Setiawan, H., & Rahayu, K. (2022). “*Masa Depan Uang Digital di Indonesia Pasca KTT G 20”*. Penerbit NEM.

huruf c”. Jasa telekomunikasi di Indonesia diantaranya adalah “jasa telepon tidak bergerak, jasa telepon seluler, jasa interkoneksi, jasa layanan pesan singkat, faksimili, jasa layanan internet seluler dan *video call*”.96 Dalam penyelenggaraannya, jasa telekomunikasi dimiliki dan dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, atau koperasi. Selain itu, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat menggunakan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.97

Penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia memiliki asas dan tujuan yang telah diatur oleh “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, Pasal 2” menyatakan bahwa: “Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.” Asas manfaat berarti bahwa “pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya guna dan berhasil guna baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin”. Asas adil dan merata adalah “bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasilnya

96 “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 9 tahun 2008 tentang Tata cara penetapan tarif jasa telekomunikasi yang disalurkan melalui jaringan bergerak seluler”.

97 Akyuwen, R. J. (2016). “Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. *Sasi*, 22(2), 30-42

dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata”. Asas kepastian hukum berarti bahwa “pembangunan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telekomunikasi harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang menjami kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum baik bagi para investor, penyelenggara telekomunikasi, maupun kepada pengguna telekomunikasi”.

Asas keamanan dimaksudkan agar “penyelenggaraan telekomunikasi selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan pengoperasiannya”. Asas kemitraan mengandung makna “bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik, dan sinergi, dalam penyelenggaraan telekomunikasi”. Asas etika dimaksudkan “agar dalam penyelenggaraan telekomunikasi senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan”. Asas kepercayaan pada “diri sendiri, dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya nasional secara efisien serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan sebagai suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global”.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi mempunyai kewajiban, seperti yang dinyatakan dalam “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :01/PER/M.KOMINFO/01/2010, Pasal 7 Peraturan Menteri ini menyatakan bahwa kewajiban peyelenggara jaringan telekomunikasi wajib”:

* 1. “Menyediakan segala fasilitas telekomunikasi untuk menjamin pelayanan jaringan telekomunikasi sesuai standar kualitas pelayanan”;
  2. “Memberikan pelayanan yang sama kepada pemakai jaringan telekomunikasi”;
  3. “Membuat ketentuan dan syarat-syarat jaringan telekomunikasi”;
  4. “Mengumumkan secara terbuka ketersediaan jaringan telekomunikasi yang dimilikinya”.

Perusahaan telekomunikasi di Indonesia memiliki perkembangan yang sangat cepat seiring dengan berkembangnya teknologi informasi98. Perusahaan jasa telekomunikasi di Indonesia sendiri begitu beragam, jumlah operator jasa telekomuniasi di Indonesia termasuk yang terbanyak di dunia yaitu mencapai 11 perusahaan jasa telekomunikasi99. Hanya ada lima operator terbesar yang masih aktif dan yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu: Telkom atau Telkomsel, Indosat, XL Axiata, bakrie telcom, dan smartfren.